

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1 Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan disajikan tinjauan pustaka yang melandasi kerangka pemikiran dan hipotesis. Tinjauan pustaka digunakan sebagai gambaran konsep dasar mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dan dilandasi dengan adanya penelitian terdahulu. Selanjutnya pada bab ini penulis juga akan membahas mengenai kerangka pemikiran yang membahas tentang hubungan antar variabel dependen dan variabel independen, kemudian diiringi dengan hipotesis yang diajukan.

2.1.1 Kemiskinan

Kemiskinan muncul karena adanya ketidakmampuan sebagian hidup masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi. Kemiskinan merupakan fenomena yang dinamis, rumah tangga yang tidak miskin dapat masuk ke dalam kemiskinan karena adanya krisis ekonomi, penyakit, dan lain-lain. Begitupun sebaliknya, rumah tangga yang miskin dapat keluar dari kemiskinan karena adanya kenaikan pendapatan, mendapatkan pekerjaan yang lebih baik, dan lain-lain.

2.1.1.1 Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, “kemiskinan” berasal dari kata “miskin” yang bermakna tidak berharta benda dan serba kekurangan. Menurut Supriatna (1997:90) dalam Islami & Anis (2019) kemiskinan merupakan keadaan yang tidak dapat tercukupi oleh seseorang yang terjadi bukan atas kehendak orang yang

bersangkutan. Sedangkan menurut BPS (2017), kemiskinan adalah ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan kondisi dimana adanya ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kehidupan pokok dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini terjadi karena rendahnya pendapatan yang diperoleh untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Kemiskinan merupakan *cross sectors problem*, *cross areas*, dan *cross generation*, sehingga untuk menanganinya dibutuhkan pendekatan yang terpadu, komprehensif, dan berkelanjutan. Menurut Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2009 tentang koordinasi penanggulangan kemiskinan, pemahaman mengenai “kemiskinan” sudah seharusnya beranjak dari pendekatan berbasis hak (*right based approach*). Pendekatan ini berarti bahwa negara berkewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap.

2.1.1.2 Bentuk Kemiskinan

Berdasarkan kondisi kemiskinan yang dipandang sebagai bentuk permasalahan multidimensional, menurut Chambers dalam Tjiabrata *et al* (2021) kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk yaitu:

1. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena pendapatan seseorang tersebut berada di bawah garis kemiskinan sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan standar seperti makanan, pakaian, tempat

tinggal, pendidikan, dan kesehatan yang dibutuhkan agar kualitas hidupnya meningkat.

2. Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya kebijakan pembangunan yang tidak merata sehingga mengakibatkan ketimpangan pendapatan atau ketimpangan kesejahteraan di suatu daerah tersebut. Daerah tersebut biasanya dikenal dengan istilah daerah tertinggal.

3. Kemiskinan Kultural

Kemiskinan kultural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena adanya perilaku dan kebiasaan masyarakat yang berasal dari budaya atau adat istiadatnya yang enggan untuk memperbaiki taraf hidupnya dengan tata cara modern. Kebiasaan tersebut berupa sikap malas, tidak hemat, tidak memiliki inovasi, dan hidupnya relatif bergantung pada orang lain.

4. Kemiskinan Struktural

Kemiskinan struktural merupakan bentuk kemiskinan yang terjadi karena masyarakat tidak dapat menggunakan sumber daya yang berada di wilayahnya karena telah dikuasai oleh orang lain.

2.1.1.3 Faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut Kuncoro (2010:8) dalam Sari (2021) secara mikro, penyebab kemiskinan adalah adanya ketidaksamaan pola dalam kepemilikan sumber daya yang menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Kemiskinan juga muncul karena adanya perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia, kualitas sumber daya manusia yang rendah mengakibatkan produktivitasnya rendah sehingga

mengakibatkan pendapatannya pun rendah. Rendahnya kualitas SDM ini disebabkan karena penduduk miskin rata-rata tingkat pendidikannya rendah.

Adapun penyebab dasar kemiskinan menurut Bank Dunia dalam Tjiabrata *et al* (2021) yaitu sebagai berikut:

1. Kegagalan kepemilikan tanah dan modal.
2. Terbatasnya ketersediaan bahan kebutuhan pokok, sarana, dan prasarana.
3. Terdapat perbedaan kualitas sumber daya manusia dan perbedaan antar sektor ekonomi.
4. Rendahnya produktivitas masyarakat.
5. Tidak adanya tata pemerintahan yang bersih dan baik (*good governance*).
6. Mengelola sumber daya alam dalam jumlah yang banyak dan tidak berwawasan lingkungan.

Sedangkan menurut Pateda *et al* (2019) terdapat beberapa faktor penyebab kemiskinan yaitu:

1. Pengangguran

Pengangguran diartikan sebagai seseorang yang tidak memiliki pekerjaan, seseorang yang tidak memiliki pekerjaan berarti tidak memiliki pendapatan. Tidak memiliki pendapatan akan menyebabkan seseorang berada dalam kemiskinan.

2. Tingkat pendidikan yang rendah

Masyarakat yang berpendidikan rendah tidak dapat bersaing dengan masyarakat yang berpendidikan tinggi. Hal tersebut mengakibatkan masyarakat

yang berpendidikan rendah akan kalah saing dalam mendapatkan pekerjaan sehingga akan menyebabkan angka pengangguran dan kemiskinan naik.

3. Bencana alam

Bencana alam seperti banjir, tanah longsor, tsunami dapat menjadi penyebab kemiskinan, karena masyarakat yang terdampak bencana tersebut akan kehilangan harta bendanya.

4. Malas bekerja

Adanya sikap malas (bersikap pasif atau bersandar pada nasib) pada seseorang akan mengakibatkan tidak adanya gairah untuk bekerja sehingga seseorang tersebut tidak akan memiliki pendapatan dan menjadi miskin.

5. Keterbatasan modal

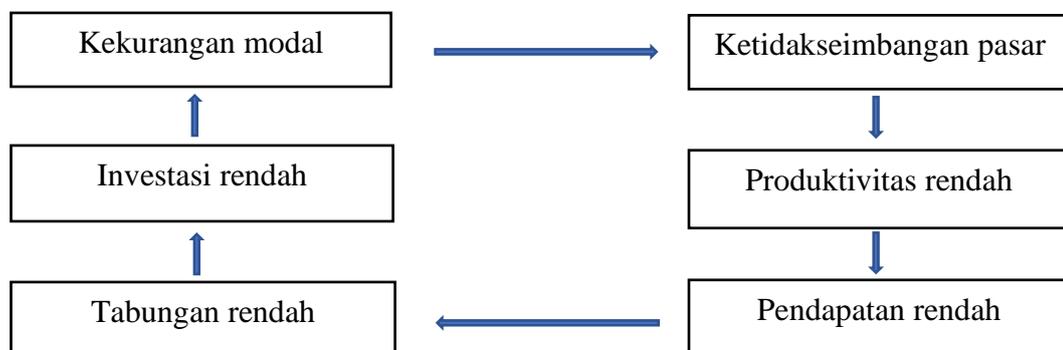
Keterbatasan modal akan menyebabkan kemiskinan. Seseorang yang tidak mempunyai modal tidak akan bisa melakukan usaha sehingga tidak mendapatkan penghasilan.

2.1.1.4 Teori Kemiskinan

Ragnar Nurske (1952) dalam Salsabilla *et al* (2022) terkenal dengan teorinya yaitu lingkaran kemiskinan dalam bukunya yang berjudul “*Some Aspects of Capital Accumulation in Underdeveloped Countries*”. Lingkaran kemiskinan ini merupakan suatu rangkaian yang saling mempengaruhi satu sama lain, sehingga akan mengakibatkan suatu keadaan dimana suatu negara akan tetap miskin dan akan mengalami kesulitan dalam mencapai pembangunan yang baik. Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal dapat menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas menyebabkan

pendapatan rendah. Rendahnya pendapatan menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi menyebabkan keterbelakangan dan seterusnya.

Menurut Ragnar Nurske dalam Didu & Fauzi (2016) terdapat dua jenis lingkaran setan kemiskinan yang dapat menghalangi pembangunan yang baik di negara berkembang yaitu dari segi *demand* dan *supply*. Berikut adalah gambar lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle of poverty*):



Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Dari segi *supply*, lingkaran setan kemiskinan dapat dikatakan sebagai berikut. Rendahnya produktivitas akan menyebabkan pendapatan yang rendah. Pendapatan yang rendah akan mengakibatkan kemampuan masyarakat untuk menabung rendah. Kemampuan menabung rendah, menyebabkan tingkat investasi rendah, tingkat investasi yang rendah akan menyebabkan kekurangan modal. Dengan demikian, tingkat produktivitasnya pun rendah sehingga akan memunculkan kemiskinan.

Dari segi *demand*, lingkaran setan kemiskinan dapat dikatakan sebagai berikut. Luas pasar yang terbatas menyebabkan penanaman modal di negara miskin cenderung rendah, hal tersebut disebabkan oleh pendapatan masyarakat

yang rendah. Pendapatan masyarakat yang rendah disebabkan oleh rendahnya produktivitas yang ditunjukkan oleh pembentukan modal yang terbatas pada masa lalu. Pembentukan modal yang terbatas disebabkan oleh kurangnya pendorong untuk melakukan penanaman modal, sehingga kemiskinan yang terjadi tidak akan ada ujungnya.

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu indikator yang sangat penting untuk menilai kinerja suatu perekonomian di suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Apabila produksi barang dan jasa meningkat dari tahun sebelumnya maka dapat dikatakan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut mengalami kenaikan. Pertumbuhan ekonomi yang terus mengalami kenaikan menunjukkan bahwa perekonomian di daerah tersebut berkembang.

2.1.2.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlaku dari tahun ke tahun. Menurut Sadono (2011) dalam Evita & Primandhana (2022) pertumbuhan ekonomi merupakan sebuah kegiatan ekonomi yang membawa perubahan peningkatan hasil produksi yang dikelola oleh masyarakat yang dapat mensejahterakan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari produk domestik regional bruto atau laju pertumbuhan PDRB, jika mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya berarti pembangunan ekonomi di daerah tersebut telah berjalan dengan baik.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah. Pertumbuhan ekonomi

juga merupakan kunci untuk mengurangi kemiskinan suatu daerah. Dengan adanya kenaikan pertumbuhan ekonomi di suatu daerah maka menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat sehingga kemiskinan berkurang (Ardian *et al.*, 2021).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan suatu hal yang mengukur prestasi dari perkembangan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada suatu periode tertentu. Indikator ini penting, karena dapat digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dicapai dan dapat dijadikan sebagai dasar kebijakan di masa yang akan datang.

2.1.2.2 Faktor-Faktor Pertumbuhan Ekonomi

Menurut teori neo klasik dalam Sanjaya (2019) pertumbuhan ekonomi tergantung pada pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi seperti penduduk, tenaga kerja, akumulasi modal, dan tingkat kemajuan teknologi. Berikut faktor-faktor yang mendukung pertumbuhan ekonomi diantaranya sebagai berikut:

1. Tanah dan kekayaan alam

Kekayaan alam yang melimpah dapat mempermudah usaha untuk mengembangkan perekonomian. Kekayaan alam tersebut meliputi luas dan kesuburan tanah, keadaan iklim dan cuaca, dan jumlah hasil hutan maupun laut yang diperoleh.

2. Jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja

Penduduk yang bertambah dari tahun ke tahun dapat menjadi pendorong atau penghambat bagi pembangunan ekonomi. Jika penduduk bertambah, jumlah tenaga kerja pun akan bertambah. Penambahan tersebut memungkinkan negara tersebut menambah produksi. Akibatnya, produktivitas bertambah dan menimbulkan pertambahan produksi semakin banyak daripada pertumbuhan tenaga kerja. Selain itu, luasnya kegiatan ekonomi dalam suatu negara juga tergantung banyaknya jumlah pengusaha. Apabila banyaknya pengusaha dalam sejumlah penduduk tertentu lebih banyak, maka akan lebih banyak kegiatan ekonomi yang dijalankan.

3. Barang-barang modal dan teknologi

Modal sangat diperlukan bagi suatu negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Adanya kemajuan teknologi yang semakin baik daripada tahun sebelumnya menyebabkan pertumbuhan ekonomi dunia pada masa kini telah mencapai tingkat tinggi. Kemajuan teknologi memegang peran penting untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, maka penggunaan modal harus disertai dengan penerapan teknologi yang maju.

4. Sistem sosial dan sikap masyarakat

Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi sistem sosial dan masyarakat memiliki peranan penting. Adat istiadat dapat menghambat masyarakat untuk menggunakan alat produksi yang modern sehingga pertumbuhan ekonomi pun tidak dapat berkembang dengan baik. Selain itu, sikap masyarakat juga dapat menentukan sampai dimana pertumbuhan ekonomi dapat dicapai. Di

sebagian masyarakat terdapat sikap masyarakat yang dapat memberikan dorongan terhadap pertumbuhan ekonomi.

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Todaro (2008) dalam Nurainah (2019) terdapat beberapa teori pertumbuhan ekonomi yaitu sebagai berikut:

1. Teori Schumpeter

Schumpeter mengatakan bahwa peranan yang sangat penting dalam rangka meningkatkan perekonomian adalah adanya pengusaha. Hal tersebut ditunjukkan dengan teorinya bahwa pengusaha merupakan golongan yang membuat inovasi dan keterbaruan dalam perekonomian. Tetapi dari setiap inovasi tersebut diperlukan investasi baru.

2. Teori Keynes

Keynes mengatakan bahwa jika seseorang mengkonsumsi suatu barang dalam perekonomian maka seseorang tersebut telah menambahkan pendapatan untuk orang lain, sehingga menyebabkan perekonomian mengalami kenaikan. Masyarakat yang memilih tidak membelanjakan uangnya akan mengakibatkan tidak adanya perputaran uang dalam perekonomian sehingga pendapatan bagi masyarakat lain pun berkurang. Hal tersebut dapat mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di suatu daerah (*Great Depression*).

Solusi Keynes untuk mengatasi masalah perekonomian tersebut adalah dengan memasukkan campur tangan dari sektor publik dan pemerintah. Keynes mengatakan bahwa pemerintah harus campur tangan untuk meningkatkan belanja masyarakat, baik dengan cara meningkatkan *supply* uang atau dengan melakukan pembelian barang dan jasa oleh pemerintah sendiri. Pendapat ini bertentangan dengan teori kapitalisme yakni *laissez-faire capitalism*. Teori ini menentang adanya campur tangan pemerintah dalam perekonomian. Teori ini percaya bahwa pasar yang bebas campur tangan dapat mencapai keseimbangannya sendiri. Keynes mengatakan bahwa dalam perekonomian, pihak swasta tidak sepenuhnya diberikan kekuasaan untuk mengelola perekonomian karena pada umumnya seperti yang dikatakan teori kapitalis dimana pihak swasta memiliki tujuan utama yakni mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Apabila hal itu dibiarkan maka perekonomian akan menjadi tidak kondusif secara keseluruhan sehingga pertumbuhan ekonomi ini akan menyebabkan kemiskinan semakin meningkat (*paradox of growth*).

Jika penduduk miskin diberikan sejumlah uang, mereka akan memilih untuk membelanjakannya dibanding untuk menabung sehingga hal tersebut dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Ide pokok dari teori Keynes adalah “Peranan Pemerintah”. Keynes menjelaskan teori ekonominya dalam buku karangannya yang berjudul “*The General Theory of Employment, Interest and Money*” dimana teori Keynes mengedepankan perekonomian melalui 3 sektor yakni:

$$Y = C + I + G + (X - M)$$

Keterangan:

Y : Pertumbuhan ekonomi

C : Konsumsi

I : Investasi

G : Pengeluaran pemerintah

X : Ekspor

M : Impor

2.1.3 Investasi

Investasi merupakan segala sesuatu yang dikeluarkan guna menambah dan mempertahankan persediaan kapital. Persediaan kapital dapat berupa mesin, pabrik, kantor, dan barang tahan lama yang dipakai dalam proses produksi. Investasi memiliki peran penting untuk meningkatkan pendapatan nasional, karena akan berpengaruh terhadap peningkatan kesempatan kerja sehingga dapat mengurangi kemiskinan.

2.1.3.1 Pengertian Investasi

Menurut Sunariyah (2003:4) dalam Celeste dan George (2018) investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya untuk jangka waktu yang panjang dengan tujuan mendapatkan keuntungan pada masa yang akan datang. Sedangkan menurut Sukirno (2000:69) investasi merupakan pengeluaran yang digunakan untuk membeli kebutuhan

dalam produksi dengan tujuan untuk mengganti dan menambah barang-barang modal dalam perekonomian yang akan digunakan untuk memproduksi barang dan jasa di masa depan. Jadi dapat disimpulkan bahwa investasi merupakan sesuatu yang dikeluarkan untuk membeli barang modal atau kelengkapan dan menambah persediaan untuk menambah kemampuan produksi.

Investasi dibagi menjadi dua yaitu penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Pada dasarnya kedua investasi tersebut memiliki tujuan yang sama. Adapun Undang-Undang yang mengatur tentang penanaman modal dalam negeri yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007. Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa tujuan dilaksanakannya penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan mensejahterakan masyarakat.

2.1.3.2 Pengertian Penanaman Modal Dalam Negeri

Penanaman modal dalam negeri atau investasi dalam negeri merupakan modal negeri yang dimaknai sebagai sumber produktif dalam masyarakat yang dapat digunakan untuk pembangunan ekonomi dan merupakan bagian dari kekayaan masyarakat termasuk hak-hak, benda-benda (bergerak, tidak bergerak) yang dapat disisihkan untuk menjalankan suatu usaha (BKPM, 1985). Penanaman modal dalam negeri merupakan indikator penting karena merupakan salah satu sumber pembiayaan bagi wilayah yang sedang berkembang dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi juga dipengaruhi oleh penanaman modal dalam negeri karena jika terjadi

peningkatan penanaman modal dalam negeri maka secara tidak langsung akan mempengaruhi kenaikan laju pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

2.1.3.3 Faktor-Faktor Mempengaruhi Investasi

Investasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam sebuah perekonomian (Pateda *et al.*, 2019). Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi investasi yaitu:

1. Potensi sumber daya alam

Salah satu sektor yang dapat meningkatkan investasi dalam suatu wilayah dapat dilihat dari potensi sumber daya alam yang meliputi sektor pariwisata, sektor perdagangan, dan sektor lainnya. Dengan memperhatikan potensi sumber daya alam di setiap wilayah akan menciptakan aktivitas ekonomi yang dapat mempengaruhi investasi. Potensi sumber daya alam memberikan pengaruh pada penanaman modal dalam negeri yaitu selain dapat meningkatkan investasi, juga dapat mengadakan pemasaran terkait investasi yang dilakukan. Sehingga dapat ikut menggerakkan nilai dari aset sekitar yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, misalnya tumbuhnya sektor pariwisata akan menciptakan sarana prasarana seperti hotel, alat transportasi, restoran dan jasa lainnya yang mendukung sektor tersebut.

2. Tingkat suku bunga

Tingkat suku bunga merupakan indikator yang digunakan sebagai penentuan tingkat pengembalian modal atas risiko yang ditanggung oleh pemilik modal dan digunakan untuk memaksimalkan keuntungan pada masa yang akan datang. Layak atau tidaknya suatu investasi dapat diukur dengan

tingkat suku bunga. Tingkat suku bunga yang tinggi akan menghambat proses penanaman modal, sedangkan tingkat suku bunga yang rendah akan mendorong penanam modal untuk melakukan investasi.

3. Pendapatan nasional

Investasi dapat dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Meningkatnya pendapatan nasional menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan terhadap pembentukan modal domestik bruto. Hal tersebut mengakibatkan penanam modal akan menanamkan modalnya apabila investasi tersebut dapat memberikan keuntungan pada masa yang akan datang. Suatu investasi diperkirakan mendapatkan keuntungan apabila terjadi kenaikan permintaan barang dan jasa. Oleh karena itu dengan meningkatnya pendapatan, permintaan barang dan jasa dapat meningkatkan jumlah proyek yang dilaksanakan.

2.1.3.4 Teori Investasi

Menurut teori klasik dalam Sanjaya (2019) investasi diartikan sebagai suatu pengeluaran yang memiliki tujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan produksi. Jadi investasi merupakan pengeluaran yang akan menambah jumlah alat-alat produksi dalam masyarakat yang akan meningkatkan pendapatan. Dengan meningkatnya pendapatan akan menyebabkan pertumbuhan ekonomi meningkat sehingga kesejahteraan pun meningkat.

Menurut Priyono dan Chandra (2016: 64-67) terdapat beberapa teori investasi menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Klasik

Teori ini pada intinya didasarkan atas teori produktivitas batas (*marginal productive*) dari faktor produksi modal (*capital*). Menurut teori klasik, besarnya modal yang akan ditanamkan dalam proses produksi ditentukan oleh produktivitas marginalnya, sehingga penanaman modal akan terus dilakukan jika produktivitas batas dari investasi masih lebih tinggi daripada tingkat bunga yang diterima.

2. Teori Keynes

Menurut Keynes, untuk menentukan jumlah atau kesempatan untuk melakukan investasi didasarkan atas konsep *marginal efficiency of investment* (MEI). Dengan melihat konsep tersebut, investasi akan dilakukan jika MEI lebih besar daripada tingkat bunga.

2.1.4 Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Salah satu tujuan ditetapkannya upah minimum adalah untuk mengurangi kesenjangan antara upah tertinggi dan terendah di suatu perusahaan. Upah yang diberikan oleh pengusaha secara teoritis dianggap sebagai harga dari tenaga yang telah dikorbankan oleh pekerja untuk kebutuhan produksi.

2.1.4.1 Pengertian Upah Minimum

Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 upah minimum merupakan upah bulanan terendah yang terdiri atas upah pokok termasuk tunjangan tetap yang ditetapkan oleh gubernur sebagai jaringan pengaman. Sedangkan upah minimum provinsi merupakan upah minimum yang

berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di satu provinsi. Upah minimum sendiri memiliki tujuan agar kualitas penduduk yang berpendapatan rendah menjadi lebih baik. Adanya peningkatan upah minimum akan menyebabkan pendapatan masyarakat meningkat, sehingga kesejahteraan pun meningkat (Ayu & Faisal, 2021).

Kebijakan upah minimum merupakan sistem pengupahan yang pada dasarnya dapat dilihat dari dua sisi. Pertama, bagi pekerja upah minimum merupakan alat proteksi untuk memperhatikan agar nilai upah yang diterima tidak mengalami penurunan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kedua, bagi perusahaan sebagai alat proteksi untuk mempertahankan produktivitas pekerja.

2.1.4.2 Jenis-Jenis Upah

Menurut Zaeni Asyhadie (2007:70) terdapat beberapa jenis upah yaitu sebagai berikut:

1. Upah Nominal

Upah nominal merupakan upah yang diterima oleh para pekerja secara tunai yang berhak diterima sebagai imbalan atas jasa-jasanya sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian kerja.

2. Upah Nyata

Upah nyata merupakan kemampuan upah nominal yang diterima oleh para pekerja jika ditukarkan dengan barang dan jasa, yang diukur berdasarkan banyaknya barang dan jasa yang bisa didapatkan dari pertukaran tersebut.

3. Upah Hidup

Upah hidup merupakan upah yang diterima oleh para pekerja yang relatif cukup untuk membiayai keperluan hidupnya secara luas, seperti pendidikan, kesehatan, rekreasi, dan lain-lain.

4. Upah Minimum

Upah minimum merupakan upah terendah yang dijadikan standar oleh perusahaan untuk menentukan upah para pekerja yang bekerja di perusahaannya. Upah minimum ini umumnya ditentukan setiap tahun oleh pemerintah.

5. Upah Wajar

Upah wajar merupakan upah yang secara relatif dinilai cukup wajar oleh pengusaha dan pekerja sebagai imbalan atas jasa-jasanya terhadap perusahaan. Upah wajar ini sangat bervariasi dan selalu berubah-ubah antar upah minimum dan upah hidup sesuai dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya, faktor-faktor tersebut adalah:

- a. Kondisi perekonomian negara;
- b. Nilai upah rata-rata di daerah tempat perusahaan itu berada;
- c. Peraturan perpajakan;
- d. Standar hidup para pekerja/buruh itu sendiri;
- e. Posisi perusahaan dilihat dari struktur perekonomian negara.

2.1.4.3 Teori Upah

Tujuan dari adanya upah minimum adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang memiliki pendapatan rendah. Menurut Ragnar Nurske dalam Salsabilla *et al* (2022) upah yang berada di bawah minimum akan menyebabkan

rendahnya kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan akan menyulitkan masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga timbullah kemiskinan. Seseorang yang memperoleh penghasilan di bawah garis kemiskinan digolongkan dalam kemiskinan absolut sehingga konsep ini bertujuan untuk menentukan tingkat upah minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Menurut Burt (1963) dalam bukunya yang berjudul "*Labor Market and Government Policies*" mengatakan bahwa terdapat beberapa teori pengupahan, diantaranya sebagai berikut:

1. Teori upah menurut pertambahan produk marginal

Teori neo klasik mengatakan bahwa pekerja akan memperoleh upah senilai dengan pertambahan hasil marginalnya. Upah disini berfungsi sebagai imbalan atas jasa-jasa yang telah dilakukan pekerja terhadap pengusaha. Upah dibayarkan oleh pengusaha sesuai dengan jasa-jasa (produktivitas) yang diberikan oleh pekerja. Jadi dapat disimpulkan artinya pada teori ini upah didasarkan pada asas nilai pertambahan hasil faktor produksi. Dimana upah merupakan imbalan atas pertambahan nilai produksi yang diterima pengusaha dari pekerja.

2. Teori upah menurut kebutuhan hidup

Teori upah menurut kebutuhan hidup merupakan teori yang dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini mendasarkan gagasannya yang berpandangan bahwa harga suatu kerja "upah" pada hakikatnya adalah pengeluaran kerja. Maka dari itu upah harus sesuai dengan harga kebutuhan-kebutuhan pokok

pekerja yang berupa makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Namun, jika tingkat upah naik di atas biaya hidup minimum pekerja, maka akan meningkatkan penawaran tenaga kerja dan menyebabkan tingkat upah menurun.

3. Teori upah besi

Teori upah besi merupakan teori yang dikemukakan oleh Ferdinand Lassalle. Teori ini mengatakan bahwa adanya kepentingan pekerja yang tidak terlindungi, sehingga untuk melindungi kepentingan pekerja peran serikat pekerja menjadi hal yang penting. Dengan adanya serikat pekerja tersebut, para pekerja akan berusaha untuk menuntut upah yang lebih besar dari kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya. Teori ini cenderung merugikan kepentingan pengusaha dan pekerja yang belum mendapatkan pekerjaan.

2.1.5 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk menjadi bahan referensi bagi peneliti dan mengetahui hasil variabel bebas peneliti terdahulu apakah variabel tersebut memiliki pengaruh yang kuat terhadap variabel terikatnya. Adapun beberapa penelitian terdahulu, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti, Tahun, dan Judul	Persamaan	Perbedaan	Hasil Penelitian	Sumber
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Yulia Adella Sari (2021) Pengaruh Upah Minimum, Tingkat Pengangguran	Kemiskinan dan upah minimum	Tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk	Upah minimum berpengaruh negatif signifikan sedangkan	Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, dan Akuntansi Vol. 10 No.2

	Terbuka, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah			tingkat pengangguran terbuka dan jumlah penduduk berpengaruh positif signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	(2021) Hal. 121-130 ISSN: 2088-7485
2.	Siti Hanifah dan Nurul Hanifah (2021) Pengaruh Pertumbuhan	Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi,	Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan upah minimum berpengaruh	<i>Journal of Economics</i> Vol. 1 No.3 (2021)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Ekonomi, Upah Minimum, dan Pengangguran terhadap Kemiskinan di Kabupaten Lamongan	dan upah minimum		negatif signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Lamongan	Hal. 191-206 ISSN: 2798-5008
3.	Rahmaniar Zulfana Putri dan Muhammad Effendi (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Bantuan Sosial, dan Kesempatan Kerja terhadap Pengentasan Kemiskinan di Kota Banjarmasin	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Belanja bantuan sosial dan kesempatan kerja	Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan belanja bantuan sosial dan kesempatan kerja berpengaruh negatif dan	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol.4 No.2 (2021) Hal. 356-366 ISSN: 2746-3249

				tidak signifikan terhadap kemiskinan di Kota Banjarmasin	
4.	Lorenzo Lamas (2022) Pengaruh Kesempatan Kerja dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi	Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Kesempatan kerja	Kesempatan kerja berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan	<i>Science of Management and Students Research Journal</i> Vol. 3 No. 4 Desember 2021 Hal. 208-214 ISSN: 2657-1633
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi	
5.	Muntina Juliana Evita dan Wiwin Priana Primandhana (2022) Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Belanja Pemerintah terhadap Kemiskinan di Kabupaten Blora	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Indeks pembangunan manusia dan belanja pemerintah	Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan signifikan sedangkan belanja pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Blora	Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis Vol. 10 No.1 Maret 2022 Hal. 79-88 ISSN: 2338-8412
6.	Ratna Mufidah, Asrudi, dan Susiani	Tingkat kemiskinan	Pengangguran	Pertumbuhan ekonomi	<i>Education and Development</i>

	(2022) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan	dan pertumbuhan ekonomi		berpengaruh sedangkan pengangguran tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan	<i>Journal</i> Vol.10 No.2 Mei 2022 Hal. 521-527 ISSN: 2527-4295
7.	Saharuddin Didu dan Ferri Fauzi (2016) Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Jumlah penduduk dan pendidikan	Jumlah penduduk, pendidikan, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan	Jurnal Ekonomi-Qu Vol.6 No.1 April 2016 Hal. 521-527 ISSN: 2541-1314
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan di Kabupaten Lebak			terhadap kemiskinan di Kabupaten Lebak	
8.	Yolanda Pateda, Vecky Masinambouw, dan Tri Oldy Rotinsulu (2019) Pengaruh Investasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Tingkat Kemiskinan di Gorontalo	Tingkat kemiskinan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi	Pengeluaran pemerintah	Investasi berpengaruh negatif dan signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan sedangkan pengeluaran pemerintah tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Gorontalo	Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah Vol.19 No.3 (2019) Hal. 1-17 ISSN: 1907-3593
9.	Ayu Salsabila, Indri Arrafi Juliannisa,	Kemiskinan dan upah	Jumlah penduduk,	Jumlah penduduk, upah	Jurnal Ekonomika

	dan Nunuk Triwahyuningtyas (2022) Analisis Faktor-Faktor Kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta	minimum	penyerapan tenaga kerja, dan IPM	minimum, penyerapan tenaga kerja berpengaruh signifikan sedangkan IPM tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta	Vol.5 No.2 Juli 2022 Hal. 96-105 ISSN: 2807-1212
10.	Putu Bagus Krisna Adi Sanjaya dan I	Kemiskinan dan investasi	Pengangguran	Investasi berpengaruh	E-Jurnal Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Made Jember (2019) Pengaruh Investasi dan Pengangguran terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Provinsi Bali			negatif dan signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Bali	Pembangunan Vol.8 No.9 (2019) Hal. 2072-2101 ISSN: 2722-5356
11.	Helly Suharlina (2020) Pengaruh Investasi, Pengangguran, Pendidikan, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Kemiskinan, investasi, dan pertumbuhan ekonomi	Pengangguran dan pendidikan	Investasi dan pengangguran berpengaruh positif dan tidak signifikan sedangkan pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap	Jurnal Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Vol. 5 No.7 (2020) Hal. 56-72 ISBN: 978-602-53460

				kemiskinan di Provinsi Kalimantan Barat	
12.	Eka Nurchitra Ayu Ningtias dan Andi Faisal Anwar (2021) Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita terhadap	Kemiskinan dan upah minimum	Pengangguran, tingkat pendidikan, dan pengeluaran per kapita	Pengangguran, tingkat pendidikan, upah minimum, dan pengeluaran per kapita berpengaruh positif dan signifikan terhadap	<i>Bulletin of Economic Studies Journal</i> Vol.1 No.1 (2021) Hal. 1-12
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Kemiskinan di Kota Makassar			kemiskinan di Kota Makassar	
13.	Laga Priseptian dan Wiwin Priana Primandhana (2015) Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan	Kemiskinan, upah minimum provinsi, dan pertumbuhan ekonomi	Indeks pembangunan manusia dan pengangguran	Upah minimum provinsi berpengaruh negatif dan signifikan, indeks pembangunan manusia berpengaruh positif dan tidak signifikan, pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan tidak signifikan sedangkan pengangguran berpengaruh positif dan signifikan	Jurnal Esensi Vol.4 No.2 (2015) Hal. 45-53 ISSN: 2087-2038

				terhadap kemiskinan	
14.	Winda Gurning, Weni Hawariyuni, dan Irsad (2021) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengentasan Kemiskinan di Sumatera Utara	Kemiskinan dan investasi	PDRB, anggaran pemerintah bidang pendidikan, dan anggaran pemerintah bidang kesehatan	PDRB dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan anggaran pemerintah bidang pendidikan dan kesehatan tidak signifikan terhadap	Jurnal Samudra Ekonomika Vol.5 No.2 September 2021 Hal. 143-151 ISSN: 2685-4287
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kemiskinan di Sumatera Utara	
15.	Amelia Sestu Rahajeng, Sri Muljaningsih, dan Kiky Asmara (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan investasi	Pendidikan dan kesehatan	Pertumbuhan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan berpengaruh signifikan sedangkan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah	Jurnal Syntax Admiration Vol. 2 No.5 Mei 2021 Hal 775-784 ISSN: 2722-7782
16.	Nuraniah (2019) Analisis Pengaruh Kesempatan Kerja, Belanja Bantuan Sosial, dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap	Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Kesempatan kerja dan belanja bantuan sosial	Kesempatan kerja, belanja bantuan sosial, dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh	Jurnal Ilmu Ekonomi dan Pembangunan Vol.2 No.1 (2019) Hal. 63-75 ISSN: 2087-

	Tingkat Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan			signifikan sedangkan kesempatan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Selatan	2038
17.	Robby Achsyansyah, Junaidin Zakaria, dan M Arifin (2020) Pengaruh	Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Pendidikan dan pengangguran	Pertumbuhan ekonomi dan pengangguran berpengaruh positif	Jurnal Paradoks: Jurnal Ilmu Ekonomi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Pengangguran terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Makassar			sedangkan tingkat pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Kota Makassar	Vol.3 No.2 April 2020 Hal. 41-53 ISSN: 1411-1713
18.	Nadia Islami dan Ali Anis (2019) Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Kemiskinan di Indonesia	Kemiskinan dan upah minimum provinsi	Pendidikan dan kesehatan	Upah minimum provinsi berpengaruh positif signifikan, pendidikan berpengaruh negatif signifikan sedangkan kesehatan tidak berpengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia	Jurnal Kajian Ekonomi dan Pembangunan Vol.1 No.3 Agustus 2019 Hal. 939-948 ISSN: 2614-6061

19.	Celeste, George, dan Audie (2018) Analisis Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Investasi terhadap Kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	Kemiskinan dan investasi	Belanja bantuan sosial	Belanja bantuan sosial dan investasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utara	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol. 18 No.1 (2018) Hal. 91-102 ISSN: 0853-6708
20.	Deysy Lendentariang, Daisy Engka, dan Krest Tolosang (2019)	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Tingkat pengangguran dan jumlah penduduk	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan sedangkan	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.19 No.2 (2019)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran, dan Jumlah Penduduk terhadap Kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe			tingkat pengangguran dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Kabupaten Kepulauan Sangihe	Hal. 23-34 ISSN: 0853-6708
21.	Pepi Putriani, Junaidi, dan Jaya Kusuma Edi (2018) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendidikan, dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Jambi Periode 2004-2017	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Pendidikan dan kesehatan	Pertumbuhan ekonomi tidak berpengaruh signifikan sedangkan pendidikan dan kesehatan berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Kota Jambi	Jurnal Pendidikan dan Ekonomi Vol.7 No.3 Desember 2018 Hal. 33-41 ISSN: 2303-1220

				Periode 2004-2017	
22.	Reki Ardian, Yulmardi, dan Adi Bhakti (2021) Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia, dan Tingkat Pengangguran Terbuka terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi Jambi	Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Indeks pembangunan manusia dan tingkat pengangguran terbuka	Pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh signifikan sedangkan tingkat pengangguran terbuka tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat	Jurnal Ekonomi Aktual Vol.1 No.1 (2021) Hal. 23-34 ISSN: 2807-1263
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				kemiskinan di Provinsi Jambi	
23.	Alessandro Tjiabrata, Daisy Engka, dan Wensy Rompas (2021) Analisis Pengaruh Pendidikan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Kesehatan terhadap Tingkat Kemiskinan di Sulawesi Utara	Tingkat kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Pendidikan dan kesehatan	Pendidikan dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan kesehatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sulawesi Utara	Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi Vol.7 No.1 (2021) Hal. 90-101 ISSN: 0853-6708
24.	Suripto dan Lalu Subayil (2020) Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan	Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi	Tingkat pendidikan, pengangguran, dan indeks pembangunan manusia	Tingkat pendidikan dan pengangguran tidak berpengaruh signifikan sedangkan	Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan Vol.1 No.2 (2020) Hal. 127-143 ISSN: 2716-

	Indeks Pembangunan Manusia terhadap Kemiskinan di Yogyakarta Periode 2010-2017			pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Yogyakarta Periode 2010-2017	2443
25.	Septyana Mega Putri dan Ni Nyoman Yuliarmi	Tingkat kemiskinan, pertumbuhan	Tingkat pengangguran	Pertumbuhan ekonomi, upah minimum, dan	E-Jurnal Ekonomi Pembangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(2013) Beberapa Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan di Provinsi Bali	ekonomi, dan upah minimum	dan tingkat pendidikan	tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan sedangkan tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Bali	Universitas Udayana Vol.2 No.10 (2013) Hal. 441-448 ISSN: 2303-0178

3.2 Kerangka Pemikiran

3.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan Tingkat Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang penting untuk melihat keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah dan merupakan syarat untuk mengurangi kemiskinan. Dengan syarat hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut

menyebarkan diseluruh golongan masyarakat, termasuk golongan penduduk miskin. Menurut Kuznet dalam Didu & Fauzi (2016) pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan memiliki kaitan yang erat, karena pertumbuhan ekonomi pada tahap awal menyebabkan tingkat kemiskinan cenderung meningkat namun pada saat mendekati tahap akhir tingkat kemiskinan cenderung menurun.

Sedangkan menurut Mankiw dalam Putri & Effendi (2021) adanya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan produksi sehingga dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Dengan meningkatnya lapangan pekerjaan dapat menstimulus perekonomian masyarakat sehingga akan mengurangi kemiskinan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Siti Hanifah dan Nurul Hanifah (2021), yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan tingkat kemiskinan. Artinya setiap terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi akan menurunkan tingkat kemiskinan.

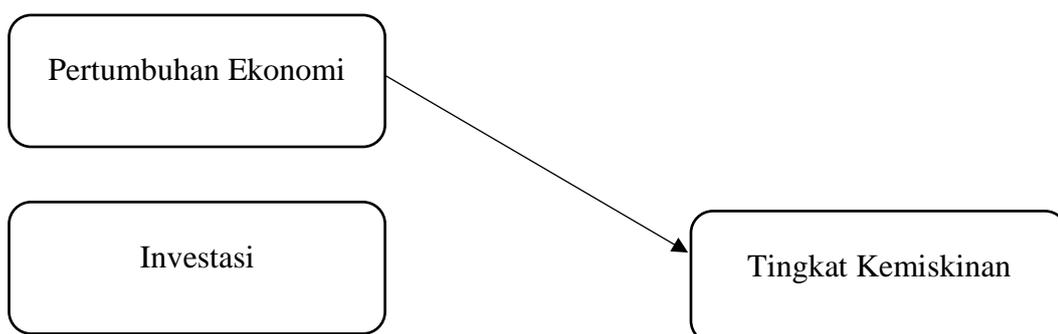
3.2.2 Hubungan Investasi dan Tingkat Kemiskinan

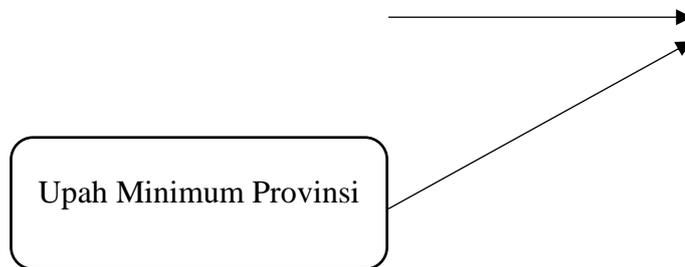
Menurut Sukirno (2000) dalam Pateda *et al* (2019) kegiatan investasi atau penanaman modal yang terus dilakukan oleh masyarakat dapat meningkatkan kesempatan kerja, pendapatan nasional, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Investasi memiliki pengaruh yang besar terhadap kemiskinan yang ada pada suatu wilayah karena dengan banyaknya investasi dari investor melalui pengembangan usaha-usaha baik berskala makro ataupun mikro, tentunya akan membutuhkan tenaga kerja untuk mengembangkan usahanya tersebut, sehingga secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja untuk masyarakat. Hal tersebut akan berdampak terhadap pengurangan jumlah penduduk miskin, karena

masyarakat telah memiliki pekerjaan akan mendapatkan pendapatan. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yolanda Pateda (2019) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara investasi dengan kemiskinan. Artinya setiap terjadi peningkatan nilai investasi, maka tingkat kemiskinan akan menurun.

3.2.3 Hubungan Upah Minimum Provinsi dan Tingkat Kemiskinan

Tujuan dari adanya upah minimum adalah usaha untuk mensejahterakan masyarakat yang berpendapatan rendah. Menurut teori Nurkse dalam Salsabilla *et al* (2022) upah yang rendah akan mempengaruhi kemampuan untuk menabung. Tidak adanya tabungan masyarakat miskin akan sulit untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehingga akan menyebabkan kemiskinan. Sedangkan menurut Kaufman (2000) dalam Islami & Anis (2019) tujuan utama ditetapkannya upah minimum adalah memenuhi standar hidup minimum. Upah minimum adalah usaha untuk mengangkat derajat masyarakat yang memiliki pendapatan rendah, terutama pekerja miskin. Semakin meningkat tingkat upah minimum maka akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga kesejahteraan juga meningkat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Yulia Adella Sari (2021) yang menemukan bahwa terdapat hubungan yang negatif antara upah minimum dengan kemiskinan. Artinya semakin meningkat upah minimum, maka tingkat kemiskinan akan menurun.





Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran

3.3 Hipotesis

1. Diduga secara parsial pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.
2. Diduga pertumbuhan ekonomi, investasi, dan upah minimum provinsi berpengaruh secara bersama-sama terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur.